

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azhari. (1995). *negara hukum indonesia analisis yuridis normatif terhadap unsur-unsurnya*. UI press.
- BPJT. (2006a). *jalan tol : peluang investasi di indonesia*. Departemen Pekerjaan Umum.
- BPJT. (2006b). *jalan tol : peluang investasi di indonesia*. Departemen Pekerjaan Umum.
- Burhan Asofa. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta,.
- C.S.T. Kansil. (1989). *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. balai pustaka.
- Clarkson H. Oglesby. (1999). *jalan*.
- Danang Sunyoto. (2013). *No Title*.
- Dr. Andri Irfan, Dr. Harry Nenobais, M.Si., Dr. Darmanto, M. E. (2021). *implementasi standar pelayanan minimal jalan tol* (S. P. Rizki utami. (Ed.); pertama).
- H. Pudi Rahardi. (2007). *hukum kepolisian (profesionalisme dan reformasi polri. laksbang mediatama*.
- Hadjon, P. M. (1987). *perlindungan hukum bagi rakyat indonesia*. bina ilmu.
- hikmahanto juwono. (2006). *problen dan fundamen bagi solusi di indonesia* (Penegakan). varia peradilan no 244.
- M.Agus Santoso. (2014). *hukum, moral, & keadilan sebuah kajian filsafat hukum* (kedua ctk (Ed.)). kencana.
- moh hatta. (n.d.). *No Titl*.
- momo kelana. (n.d.). *HUKUM KEPOLISIAN*.
- momo kelana. (1972). *hukum kepolisian (perkembangan di indonesia) suatu studi histories komperatif*. ptik.
- MS Kaelan. (1996). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Paradigma.
- muhammad syukri albani nasution. (2017). *hukum dalam pendekatan filsafat* (ctk kedua). kencana.
- Purwodarminto, W. J. . (1986). *kamus umum bahasa indonesia*. balai pustaka jakarta.

- Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Raharjo, S. (2000). *ilmu hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rianto, B. samad. (2006). *pemikiran menuju polri yang profesional, mandiri, berwibawa, dan dicintai rakyat* (PTIK Press).
- Sadjijono. (n.d.). *memahami hukum kepolisian*.
- Sadjijono. (2006). *hukum kepolisian, perspektif kedudukan dan hubungan dalam hukum administrasi*. laksbang pressindo.
- Sadjijono. (2008). *Mengenal hukum kepolisian perspektif kedudukan dan hubungannya*. pradnya paramita.
- Sadjijono. (2010). *memahami hukum kepolisian* (laksbang p).
- satjipto raharjo. (2002). *No Titl*.
- Simorangkir JCT. (2002). *kamus hukum* (aksara bar).
- Soebroto Brotodiredjo. (1985). *hukum kepolisian di indonesia* (C. Pertama (Ed.); tarsito). satu bunga rampai.
- soejono soekanto. (2007). *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT raja grafindo persada.
- sugiono. (2014). *No Title*.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri. (2019a). *pengantar hidup kepolisian* (M. H. . P. I. D. H. B. A. A. S. kombes pol Dr.S.M. Handayani, M.Si.; AKBP Drs. J. Ebnu Suprihartanto, M.M., M.PD.; Pembina Dr. (c) Ekawaty K, S.H. (Ed.)). lembaga ppendidikan dan pelatihan Polri.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri. (2019b). *pengantar hidup kepolisian* (M. H. . P. I. D. H. B. A. A. S. kombes pol Dr.S.M. Handayani, M.Si.; AKBP Drs. J. Ebnu Suprihartanto, M.M., M.PD.; Pembina Dr. (c) Ekawaty K, S.H. (Ed.)). lembaga pendidikan dan pelatihan polri.
- Utomo, warsito hadi. (2005). *hukum kepolisian di indonesia* (prestasi p).
- W.J.S. Purwodarminto. (1986). *kamus umum bahasa indonesia*. balai pustaka jakarta.

B. Undang-Undang

- Indonesia, kepolisian negara republik. (2002). *UU RI No 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 8(1), 698–703.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jher.2011.03.002>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.m>

arpolbul.2013.12.024%0Ahttps://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=-

1&isAllowed=y%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium

INDONESIA, S. N. R. (2004). *Undang undang no 34 tahun 2004 tentang jalan. 1*, 1–42. http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF

Konsumen, P. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 2003*(1), 1–5.

Pidana, (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara. (2015). *(KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1*(Rineka Cipta), 143.

PM_96_Tahun_2015.pdf. (n.d.).

PP No 15. (2005). PP No 15 Peraturan Pemerintah Tentang Jalan Tol. *PP No 15*.

UU_2009_22. (2009). *UU_2009_22*. <https://doi.org/10.1038/132817a0>

C. Sumber Lain

bambang suprayitno. (2012). privasi jalan tol sebagai solusi dalam mempercepat terwujudnya infrastruktur jalan tol yang memadai di indonesia. *Jurnal Economia, 8*(1).

Budi hartanto susilo, ivan imanuel. (2018). analisis lalu lintas penerapan sistem satu arah di kawasan dukuh atas. *Teknik Sipil, 12*(2), 105.

joko rudiantoro. (2014). diskresi kepolisian dalam mengatasi tindakan anarki di masyarakat. *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 11*(6), 489–500.

Presiden, youtube sekretariat. (2022). *jokowi : one way hingga ganjil genap di tol tetap diberlakukan saat arus mudik balik lebaran*.

ryanto ulil anshar, joko setionno. (2020). tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum dalam perspektif pancasila. *Pembangunan Hukun Indonesia, 2*(3), 359–372.

Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum, 8*(3), 199–204. <https://bit.ly/2FhMAKf>